

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT jika dilihat dari analisis rasio pendapatan daerah masih sangat rendah dilihat dari rata-rata Analisis varians sebesar Rp. 33.407.500 (kurang baik), rasio efektivitas sebesar 79,82% (kurang baik) dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 25,16% (sedang) disebabkan kurangnya sarana prasarana dan sosialisasi .
2. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT jika dilihat dari analisis varian belanja sebesar 93,94% (cukup baik), analisis pertumbuhan belanja daerah sebesar 36,06% (kurang baik) , rata-rata rasio belanja operasi 57,48%, rata-rata rasio belanja modal 14,68%, rata-rata rasio belanja langsung 51,64%, dan rasio efisiensi belanja sudah dikatakan efisien karena pemerintah daerah sudah baik dalam menghemat keuangannya (<100 %) sebesar 93,94%.Hal ini menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT masih diprioritaskan untuk belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun kebutuhan belanja daerahnya.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syuikriy. Manajemen Kas Daerah. (2010)
- Allen, Richard & Daniel Tommasi. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD. (2001)
- Amelia, Riska. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (APAJI) 2.2* (2020)
- Herdiyana, D., & Andriana, N. . Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 4(1)*, 191-203. (2020)
- Karina, A., & Noerainy, D. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *AkunNas, 13(1)*. (2019)
- Kasanah, I. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Asas Transparan Akuntabel Partisipasif Tertib dan Disiplin Anggaran :(Studi Kasus Desa Gunan Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri). *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi), 9(01)*, 113-128. (2020).
- Oktaviane, D. P. Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced Scorecard. *JESS (Journal of Education on Social Science), 5(1)*, 108-122. (2021).
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Priskila, E., & Hukom, A. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Melalui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2(2)*, 173-183. (2023)
- Storkey, I. *Government Cash and Treasury Management Reform, Governance Brief, Asian Development Bank. In-text reference: (Storkey,2003)*
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.